

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DI KECAMATAN KOMBI

IMPLEMENTATION OF VILLAGE OWNED ENTERPRISE MANAGEMENT POLICY (BUM DESA) IN KOMBI DISTRICT

Yulia Rantung⁽¹⁾, Agustinus Pati⁽²⁾, Femmy Tulusan⁽²⁾

1) Peneliti Independen

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: intanrantung98@gmail.com

Naskah diterima melalui Website Jurnal Ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id	:	Selasa, 15 Juni 2021
Disetujui diterbitkan	:	Rabu, 28 Juli 2021

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of Village Owned Enterprises (BUM Desa) management policies in Kombi District. The sampling technique used purposive sampling so that Kombi Village, Ranowangko Dua Village and Tulap Village were selected. The research method is descriptive with interviews, with data analysis, namely data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results showed that the implementation of the Village Owned Enterprise Management Policy (BUM Desa) in Kombi District for communication indicators still found discrepancies, namely the transmission of information dissemination, besides that the clarity of information about each program was still very lacking and the information submitted related to the program was not carried out consistently and continuously by BUMDes in Kombi District.

Keywords: policy implementation; village owned enterprises (BUM Desa)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Kombi. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan *purposive sampling* sehingga terpilih Desa Kombi, Desa Ranowangko Dua dan Desa Tulap. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif dengan wawancara, dengan analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Kombi untuk indikator komunikasi masih ditemukan ketidaksesuaian yaitu transmisi penyebaran informasi, selain itu kejelasan informasi mengenai setiap program masih sangat kurang dan informasi yang disampaikan terkait program tidak dilakukan secara konsisten dan terus menerus oleh BUM Desa yang ada di Kecamatan Kombi.

Kata Kunci : implementasi kebijakan; badan usaha milik desa (BUM desa)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai upaya untuk mendorong pembangunan ditingkat desa, pemerintah memberikan kewenangan untuk mengelola daerahnya secara mandiri kepada pemerintah desa. Salah satu produk dari kebijakan pemerintah adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan Lembaga berbasis ekonomi ditingkat desa yang menjadi program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk meningkatkan dan mengembangkan ekonomi desa dan Pendapatan Asli Desa (PADes). PP No 11 Tahun 2019 tentang Desa menyatakan Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan tersebut juga mengandung pengakuan keberadaan otonomi desa. Sehingga otonomi desa atau hak desa dalam mengelola setiap sumber daya yang ada juga memungkinkan desa tersebut untuk melaksanakan kewenangan yang diatur baik dalam pelaksanaan pemerintahan, pengembangan maupun dalam pengelolaan finansial di desa.

Berbagai program yang pemerintah lakukan menyadari pentingnya pembangunan di desa salah satunya adalah untuk meningkatkan pembangunan di wilayah yang masih membutuhkan perhatian khusus, tetapi hasilnya belum cukup signifikan atau belum mampu memberikan peningkatan kepada masyarakat dari segi kualitas kehidupan serta kemakmuran masyarakat. Karena hal tersebut, peningkatan infrastruktur di tingkat desa seharusnya dilaksanakan dengan optimal dan tepat sasaran sehingga mampu mengakomodir seluruh hal-hal pokok yang dibutuhkan penduduk di wilayah tersebut. Sehingga peningkatan infrastruktur yang dilaksanakan di tingkat desa bisa dirasakan masyarakatnya dan dengan adanya pembangunan di desa, diharapkan mampu berpengaruh terhadap

perekonomian dan dapat menjadikan penduduk di desa lebih sejahtera melalui 4 (empat) aspek utama, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi desa dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Salah satu program pemerintah dalam menunjang pembangunan di desa adalah kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama.

Salah satu program pemerintah dalam menunjang pembangunan di desa adalah kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah badan usaha yang dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa penyelenggaraan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) mencakup dua fungsi utama dari peruntukan dana desa, yaitu sebagai fungsi pembangunan desa dan sebagai fungsi pemberdayaan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebagai instrumen pembangunan desa adalah untuk mengembangkan potensi desanya dan mendorong pemerintah desa sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrumen pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat yakni dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa. Karena hal tersebut pihak yang berwenang sebagai aparatur dan pemerintahan menerbitkan peraturan tentang Daerah Otonomi yaitu memberikan hak kepada aparatur daerah dalam mengembangkan serta mengoptimalkan segala sumber daya di wilayah tersebut khususnya yang belum digunakan sepenuhnya dengan tujuan pengembangan ekonomi di daerahnya secara mandiri dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah tersebut (Toriqi, 2015).

Kecamatan Kombi merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Minahasa yang terdiri dari 13 desa. Kecamatan Kombi memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah khususnya di bidang pertanian dan perikanan dikarenakan letak wilayah Kecamatan Kombi berada dekat dengan pantai dan banyak perkebunan yang adalah hak milik masyarakat Kecamatan Kombi yang menjadi sumber pekerjaan mereka. Oleh karena itu dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diharapkan mampu mengembangkan potensi alam yang ada dan dapat mendayagunakan masyarakat untuk mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) tersebut sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Atas dasar tersebut, kemudian Kecamatan Kombi mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di masing-masing desanya. Kecamatan Kombi merupakan daerah di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar luas wilayahnya adalah pesisir pantai. Potensi Wisata yang dimiliki desa yang ada di Kecamatan Kombi dapat terus dikembangkan karena saat ini wisata Pantai merupakan objek wisata yang sangat diminati oleh masyarakat. Tentunya ini menjadi peluang bagi masyarakat dan pemerintah setempat untuk mengembangkan potensi wisata pantai menjadi peluang usaha ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang kemudian mampu memberdayakan masyarakat setempat untuk mendapatkan pekerjaan juga untuk memelihara kelestarian daerah pesisir pantai yang ada di Kecamatan Kombi. Dukungan dana desa dalam upaya untuk membentuk unit Badan Usaha Milik Desa diharapkan mampu membangun setiap potensi desa yang ada di Kecamatan Kombi dan memberdayakan masyarakat setempat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat dan meningkatkan nilai tambah untuk setiap potensi yang ada di wilayah tersebut.

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, penulis menemukan bahwa dalam pengimplementasiannya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang ada di 13 desa di Kecamatan Kombi telah terbentuk, namun hanya 3 desa yang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) nya masih berjalan dan aktif sampai saat ini, yaitu desa Tulap, Desa Ranowanko, dan Desa Kombi.

Implementasi Kebijakan

Menurut (Edward III, 2004) dalam Liow (2018) menyatakan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan BUM Desa yang baik bisa

ditinjau dari faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Edward III (2004) dalam Liow (2018) menyatakan bahwa dalam menilai dan menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan bisa diukur dari empat variabel berikut yaitu:

- a. Komunikasi
Dimana di dalam variabel komunikasi terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi yaitu: Transmisi, Kejelasan, Konsistensi
- b. Sumberdaya
Dimana di dalam variabel sumberdaya terdapat empat indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel sumberdaya yaitu: Staf, Fasilitas, Informasi, Kewenangan
- c. Disposisi
Dimana di dalam variabel disposisi terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel disposisi yaitu: Pengangkatan Birokrat, Insentif
- d. Struktur Birokrasi
Dimana di dalam variabel struktur birokrasi terdapat dua indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel struktur birokrasi yaitu:
 - 1). Melakukan SOP (*Standard Operating Procedurs*)
 - 2). Melakukan Fragmentasi

Rumusan Masalah

Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi ?

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi.

Manfaat Penelitian

Dilihat dari apa yang menjadi tujuan dari penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Hasil dari penelitian ini bisa berguna serta dapat memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai bahan penkajian ilmiah khususnya dalam bidang ilmu pengelolaan sumber daya pembangunan khususnya manajemen administrasi publik. Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

2. Manfaat Praktis

Mampu memberikan pengetahuan untuk masyarakat tentang tata cara mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sehingga dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat. Dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi guna meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa).

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Kombi Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Kajian ini dilakukan selama 6 bulan atau 1 semester.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi. Objek dalam penelitian ini adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Kombi.

Sumber Data

Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi perlu adanya data seperti:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek atau subjek yang diteliti. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara mendalam yang diberikan kepada informan yang telah dipilih dalam penelitian ini dari masyarakat Kecamatan Kombi. Data primer lainnya didapatkan berdasarkan kejadian langsung dan apa yang penulis ketahui tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), karena penulis termasuk masyarakat yang berdomisili di wilayah Kecamatan Kombi.

2. Data Sekunder

Merupakan informasi yang didapatkan penulis melalui beberapa bahan yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Informasi yang diambil penulis dalam hal ini berupa dokumen aparatur desa tentang Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan catatan peneliti di lapangan.

Teknik pengumpulan data

Sugiyono (2009) dalam bukunya menyatakan teknis pengumpulan data merupakan tahapan yang paling optimal saat melakukan suatu kajian, dikarenakan maksud utama dilakukannya penelitian yaitu untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan teknik-teknik, dibawah ini:

a. Pendalaman Tanya Jawab

Pendalaman Tanya jawab merupakan cara mendapatkan atau mengumpulkan informasi berdasarkan penjelasan yang diberikan oleh narasumber dimana setiap pertanyaan yang dikemukakan oleh pewawancara dalam hal ini penulis dapat mendeskripsikan tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berbentuk dokumentasi dalam hal ini bisa berupa arsip foto, surat, jurnal kegiatan, catatan harian, hasil rapat, dan lain-lain. Studi dokumentasi diperoleh dengan cara mengumpulkan dokumen visual yang searah dengan kajian ini. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan arsip milik pemerintah Kecamatan Kombi yang berhubungan dengan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), seperti SK pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Peraturan Desa mengenai pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Serta contoh Sejarah Desa.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan, perhatian atau pengawasan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengumpulkan data lewat observasi yaitu bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, gejala-gejala alam, proses kerja, dan responden yang diamati tidak terlalu besar. Penelitian ini menggunakan observasi partisipan yaitu dimana peneliti terlibat langsung dalam kegiatan informan yang terjadi di lapangan. Peneliti juga menggunakan pedoman observasi sehingga dapat memudahkan peneliti untuk memperoleh dan mengamati informasi serta data yang diharapkan dapat mendeskripsikan mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi.

Fokus Penelitian

Fokus dari Penelitian ini untuk menjelaskan tentang implementasi kebijakan pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Kecamatan Kombi.

Informan Penelitian

Informan pada penelitian ini terdiri dari 9 orang yaitu:

1. Pemerintah Desa Kombi Anggota, Samuel Raming (SR)
2. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Kombi, Junaidi Mukuan (JM)
3. Warga Masyarakat Desa Kombi, Ribka Sumendap (RS)
4. Pemerintah Desa Ranowanko Dua, Renny H. Bolung (RB)
5. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Ranowanko Dua, Ken Walujan (KW)
6. Warga Masyarakat Desa Ranowanko Dua, Hanny Lengkong (HL)
7. Pemerintah Desa Tulap, Ronly Kerap (RK)
8. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Desa Tulap, Steven Lalan (SL)
9. Warga Masyarakat Desa Tulap, Frangky Lelet (FL)

Teknik Analisis Data

Sugiyono (2009) Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat seperti yang disarankan oleh data. Aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktifitas tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

1. Reduksi Data

Pengurangan atau Reduksi adalah metode pengorganisasian data yang dilakukan sehingga dapat diperoleh kesimpulan akhir yang di verifikasi dan juga memilah, mengarahkan, menajamkan dan membuang yang tidak perlu.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan cara memperoleh data dari tempat penelitian dengan melakukan tanya jawab, dokumentasi serta observasi sambil memilih langkah penyajian informasi yang benar sehingga mampu memilih fokus dan tujuan dari data pada proses penyajian informasi nantinya.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang diperoleh kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Kombi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat II Minahasa Nomor: PEM.1/3/34/63 tertanggal 26 November 1963 tentang: pembagian wilayah administrasi distrik bawahan Eris dan Kombi dan diresmikan pada tanggal 12 Desember 1963. Kecamatan Kombi adalah salah satu dari 25 Kecamatan di Kabupaten Minahasa yang letak geografisnya berada di sebelah Utara garis khatulistiwa antara 0.30 –40.30° LU dan 121-127°BU dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, suhu maximum dan minimum 34°C/24°C. Memiliki 13 desa, 55 jaga dengan luas wilayah: 12.130 Ibukota Kecamatan berkedudukan di desa Kombi.

Batas Wilayah Kecamatan Kombi Utara berbatasan dengan Kecamatan Kauditan & Kema Kabupaten Minahasa Utara. Timur berbatasan dengan Laut Maluku. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lembean Timur Dan Eris. Barat berbatasan dengan Kecamatan Eris Dan Tondano Timur.

Hasil Wawancara

Informan SR

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator komunikasi sudah terjalin dengan baik, baik program maupun teknisnya sudah terkoordinasi dengan baik antra pengurus dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Informasi yang ada dari pembuat kebijakan telah disampaikan dengan baik kepada pelaksana kebijakan sehingga telah tercipta penyaluran informasi yang baik antara sesama pelaksana. Selain itu kebijakan – kebijakan yang ada di BUMDesa dapat diterima dengan jelas oleh sasaran kebijakan dapat diterima dengan jelas sehingga diketahui maksud dan tujuan dari kebijakan selanjutnya juga terdapat konsistensi dari komunikasi sehingga dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator Sumberdaya yaitu sumber daya yang ada sudah terbilang memadai, baik dari segi sumberdaya manusia yang ada peralatan yang dibutuhkan serta fasilitas dan informasi dimana setiap orang yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan telah memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab. Selain itu peralatan sarana dan prasarana yang digunakan dalam operasionalisasi implemementasi suatu kebijakan telah lengkap. Selanjutnya informasi yang relevan tentang BUMDesa selalu tersedia dan setiap sumberdaya manusia yang ada memiliki kewenangan sesuai peraturan yang berlaku.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi dalam pelaksanaannya pengangkatan dan pemilihan pegawai pelaksana yang ada di BUMDesa telah berjalan dengan baik dimana mereka yang terpilih adalah yang berdedikasi tinggi terhadap setiap kebijakan yang ada di BUMdesa. Selain itu untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana yang ada di BUMDesa maka dilakukan pemberian insentif dan penghargaan baik dalam bentuk uang atau lainnya.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi dalam penerapannya SOP untuk BUMDesa masih belum jelas sehingga belum ada pedoman yang utuh bagi tiap implementor untuk bertindak. Ketidakjelasan ini tentunya masih perlu untuk diperbaiki. Organisasi yang masih terpecah-pecah membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.

Informan JM

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator komunikasi yaitu untuk komunikasi dengan masyarakat sudah terjalin dengan baik, setiap program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sudah diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat desa Kombi, namun untuk transmisi atau penyampaian informasi dari pengurus BUMDesa dengan pemerintah masih kurang terjalin dengan baik. Transmisi informasi mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya dikelola dari kami akan tetapi saat ini masih pemerintah yang mengaturnya sehingga kami hanya menjalankan teknisnya saja.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumber daya, menurut informan 2 sumber daya yang ada sudah terbilang cukup terlatih dan sesuai dengan yang dibutuhkan organisasi, baik

dari segi sumberdaya manusia dan fasilitas yang dibutuhkan sudah lengkap. Dan sumberdaya yang ada melaksanakan kebijakan telah memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab. Selain itu fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan setiap kegiatan operasional BUMDes telah tersedia.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi yaitu untuk pengangkatan pegawai dan pengurus BUMDes dilakukan dengan baik dan memilih mereka yang berdedikasi tinggi untuk dijadikan pegawai dalam BUMDes. Selain itu diberikan penghargaan untuk memacu kinerja.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi yaitu masih terdapat intervensi pemerintah sehingga tidak berjalan sesuai SOP menurut masih dibutuhkan SOP yang jelas untuk setiap pengurus yang ada.

Informan RS

Implementasi Kebijakan ditinjau dari indikator komunikasi menurut informan RS penyebaran informasi yang dilakukan kepada masyarakat belum cukup baik dimana tidak semua masyarakat mengetahui apa itu BUMDesa dan apa saja program yang ada di BUMDesa. Selain itu ketidakjelasan informasi dan informasi yang ada tidak disampaikan secara terus menerus oleh pengurus BUMDesa.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumberdaya menurut informan RS sumberdaya yang ada di BUMDesa sudah cukup baik dan fasilitas yang ada telah cukup baik. Selanjutnya implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi, informan RS menyatakan bahwa belum ada SOP yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab mereka yang ada dalam struktur organisasi atau mereka yang secara langsung terlibat dalam BUMDesa.

Informan RB

Implementasi kebijakan BUMDesa ditinjau dari indikator komunikasi menurut informan RB penyampaian informasi terkait program dari BUMDesa yang dilakukan sudah diketahui oleh masyarakat sebagai salah satu sasaran dari program BUMDesa dan telah banyak masyarakat yang menggunakan berbagai program yang dilaksanakan oleh BUMDesa, selain itu komunikasi antar sesama pengurus BUMDesa dan pemerintah sudah terjalin dengan baik. Informasi terkait program juga disampaikan dengan jelas dan proses penyampaian informasi selalu konsisten sehingga bisa dijalankan oleh setiap orang yang terlibat.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumberdaya yaitu sumberdaya manusia yang ada sudah cukup memadai, namun masih belum banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ide ide untuk program program yang kreatif dan inovatif. Untuk fasilitas yang tersedia juga sudah cukup memadai mengenai informasi dan kewenangan telah jelas disampaikan kepada setiap orang yang terlibat dalam organisasi BUMDesa, pemerintah dan masyarakat.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi dalam pengangkatan pegawai atau staf yang terlibat di BUMDesa telah cukup baik dan dilakukan dengan musyawarah untuk memilih dan menentukan mereka yang akan terlibat dalam organisasi BUMDesa. Dalam hal pemberian insentif atau penghargaan saat ini belum dilakukan hanya gaji saja.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi yaitu struktur organisasi yang ada di dalam BUMDesa telah cukup baik dan terdiri dari orang orang yang memahami mengenai setiap potensi yang ada di Desa namun terkait dengan SOP kami masih berpatokan pada peraturan pemerintah sehingga menurut saya perlu diperjelas lagi SOP agar setiap anggota BUMDesa dan mereka yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif.

Informan KW

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator komunikasi yaitu informasi yang diberikan oleh BUMDesa telah menjangkau sasaran yaitu masyarakat dan masyarakat juga telah mengetahui program yang ada pada BUMDesa namun kami akan berusaha dengan lebih baik agar penyampaian informasi mengenai program BUMDesa semakin diketahui oleh masyarakat, informasi akan lebih disampaikan dengan jelas dan secara terus menerus agar bisa diketahui oleh masyarakat.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumberdaya yaitu sumberdaya manusia yang ada di BUMDesa sudah memahami setiap tugas dan tanggung jawab yang ada serta telah berkontribusi dalam pembangunan desa walaupun mayoritas dari pengurus BUMDesa adalah lulusan SMA. Informasi dan kewenangan kami juga sudah cukup jelas.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi dimana dalam pengangkatan pegawai atau staf yang terlibat dalam BUMDesa

telah dilakukan dengan baik dan dalam pemilihan walaupun masih terdapat kekurangan yaitu kebanyakan yang dipilih adalah orang yang memiliki hubungan dengan aparat pemerintah namun menurut saya kinerjanya sudah baik.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi yaitu orang-orang yang ada dalam struktur organisasi BUMDesa di Desa Ranowanko telah baik namun terkait dengan SOP sebaiknya diberikan suatu SOP yang akan menghindari ketidakjelasan prosedur kerja bagi setiap anggota BUMDesa yang ada.

Informan HL

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator komunikasi menurut informan HL BUMDesa yang ada di Desa Ranowanko sudah cukup diketahui oleh masyarakat namun perlu ditingkatkan lagi kualitas informasi agar jelas dan bisa diketahui oleh masyarakat karena walaupun banyak masyarakat yang sudah menggunakan setiap program BUMDesa namun masih ada juga yang tidak mengetahui.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumberdaya, sumberdaya manusia yang ada pada BUMDesa telah cukup baik namun kami masyarakat menantikan ide dan gagasan untuk program yang mampu mengembangkan Desa kami dan meningkatkan kualitas SDM yang ada di Desa.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi menurut informan HL dalam pemilihan staf atau pegawai BUMDesa masih banyak intervensi dari pemerintah dimana mayoritas pengurus BUMDesa adalah mereka yang berhubungan dengan pemerintah di Desa bukan berdasarkan dedikasi dan kemampuan seseorang.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi menurut informan HL mereka yang terlibat dalam BUMDesa harus diatur tugas pokok dan tanggung jawab yang harus dikerjakan agar setiap pengurus dapat bekerja dengan lebih profesional lagi dan pembangunan desa melalui wadah BUMDesa akan berjalan dengan lebih baik.

Informan RK

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator komunikasi menurut informan RK penyaluran informasi mengenai setiap program yang ada di BUMDesa telah berjalan dengan baik dimana informasi bisa diakses dengan jelas oleh

masyarakat yang ada di Desa Tulap dan masyarakat telah menggunakan setiap program yang ada pada BUMDesa. Konsistensi informasi yang disampaikan juga sudah baik dan dikomunikasikan dengan sebagaimana mestinya.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumberdaya manusia menurut informan RK sumberdaya yang ada pada BUMDesa yaitu sumberdaya manusia telah berkualitas dan mampu mengeluarkan ide-ide kreatif dalam pengembangan setiap program yang ada di BUMDesa Tulap dalam rangka memanfaatkan setiap potensi desa yang ada.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi menurut informan RK pengangkatan staf yang ada pada BUMDesa telah dilakukan dengan baik dan optimal dengan melihat dedikasi dan kemampuan mereka yang ditunjuk sebagai pengurus BUMDesa. Mengenai pemberian penghargaan saat ini belum dilakukan hanya memberikan gaji atau insentif bagi pengurus BUMDesa.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi menurut informan RK struktur organisasi yang ada di dalam BUMDesa sudah cukup baik dan terdiri dari orang-orang yang memahami mengenai setiap pengembangan potensi yang ada di Desa namun terkait dengan SOP kami masih berpatokan pada peraturan pemerintah sehingga menurut saya perlu diperjelas lagi SOP agar setiap anggota BUMDesa dan mereka yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif.

Informan SL

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator komunikasi menurut informan SL proses penyaluran informasi mengenai setiap program yang ada telah berjalan dengan baik dan kami sebagai pengurus BUMDesa telah memberitahukan kepada masyarakat setiap informasi yang dibutuhkan dengan jelas dan secara terus menerus agar masyarakat memahami dan mendukung setiap program yang ada di BUMDesa.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumberdaya menurut informan SL BUMDesa di Desa Tulap secara keseluruhan telah memadai dan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang ada. Selain itu fasilitas yang tersedia sudah cukup baik untuk menunjang setiap kegiatan operasional program-program yang dilakukan oleh BUMDesa. Informasi mengenai bagaimana cara melakukan dan menerapkan setiap program serta kewenangan pun telah jelas bagi kami tiap anggota yang ada.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi menurut informan SL Dalam hal pengangkatan staf menurut saya BUMDesa yang ada di Desa Tulap melakukan pengangkatan staf sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan menunjuk pengurus berdasarkan pengabdian dan dedikasi selain itu untuk penghargaan atau pemberian lainnya masih belum dilakukan selain gaji.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi menurut informan SL orang-orang yang ditunjuk dan ada dalam struktur organisasi di BUMDesa Tulap telah cukup baik dan terdiri dari orang-orang yang memahami mengenai setiap potensi yang ada di Desa namun masih dibutuhkan SOP agar setiap anggota BUMDesa dan mereka yang terlibat dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif berdasarkan tugas yang dipercayakan dan diatur caranya dalam SOP.

Informan FL

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator komunikasi menurut informan FL Menurut saya untuk penyaluran informasi masih kurang dilaksanakan dengan baik karena kami masyarakat masih banyak yang belum mengetahui program yang ada di BUMDesa selain itu informasi tidak disampaikan secara jelas kepada keseluruhan masyarakat dan penyampaian informasi terkait program BUMDesa tidak dilakukan secara terus menerus.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumberdaya menurut informan FL Sumberdaya manusia yang ada di Desa Tulap sudah cukup baik dan mereka yang terpilih sebagai pengurus BUMDesa telah melakukan kinerja yang baik dalam meningkatkan setiap program yang ada.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi menurut informan FL dalam hal pengangkatan staf menurut saya BUMDesa yang ada di Desa Tulap melakukan pengangkatan staf telah sesuai dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing pengurus BUMDesa yang ada.

Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi menurut informan FL sebagai masyarakat struktur organisasi dan orang-orang yang terlibat di dalam BUMDesa Tulap sudah melakukan kerja dengan baik namun saya melihat masih ada ketidakjelasan dalam SOP antar beberapa organisasi yang akhirnya mengalami benturan sehingga membutuhkan koordinasi yang lebih intensif.

Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Kombi

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Unit usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidangekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMDesa (Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021). Kecamatan Kombi merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar luas wilayah nya merupakan pesisir pantai, terdapat 13 Desa yang ada di Kecamatan Kombi. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di setiap Desa yang ada di Kecamatan Kombi hanya 3 Desa yang sampai saat ini terus eksis dalam mengembangkan usahanya, yaitu Desa Kombi, Desa Ranowanko Dua, Desa Tulap sehingga berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan wawancara kepada informan yang ada di 3 Desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis ditemukan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang ada ditinjau dari indikator komunikasi didapati bahwa komunikasi yang tercipta telah cukup baik dimana terdapat transmisi penyebaran informasi mengenai program yang dijalankan oleh BUMDesa telah dilakukan kepada masyarakat dan informasi yang disampaikan telah jelas memuat segala hal yang perlu diketahui oleh masyarakat terkait program dan pertanggungjawaban yang ada dan dimiliki oleh BUMDesa di Kecamatan Kombi, namun transmisi penyebaran informasi dinilai masih kurang menjangkau masyarakat yang ada dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program yang ada dalam BUMDesa dan apa saja tugas dan fungsi BUMDesa, selain itu kejelasan informasi mengenai setiap program masih sangat kurang dikarenakan masyarakat belum mengetahui secara pasti apa saja program-program yang dijalankan oleh BUMDesa yang ada. Kesimpang siuran transmisi penyebaran informasi, ketidakjelasan isi dari informasi dan informasi yang disampaikan terkait program tidak dilakukan secara konsisten dan terus menerus adalah permasalahan dalam implementasi kebijakan BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi.

Selanjutnya untuk indikator sumberdaya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis didapati bahwa sumberdaya yang ada terkait dengan manusia (*staf*), peralatan (*facilities*), dan hal – hal lainnya yang menunjang operasional serta informasi dan kewenangan yang ada pada BUMDesa di Kecamatan Kombi, untuk sumberdaya terkait manusia sudah terbilang cukup terlatih dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi, dimana sumberdaya yang ada untuk melaksanakan kebijakan telah memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab. Namun belum banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ide-ide dan program yang kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan potensi yang ada di setiap desa untuk memajukan ekonomi di Desa. Untuk peralatan dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam rangka menunjang operasional program dan kegiatan BUMDesa sudah cukup memadai dan membantu BUMDesa yang ada untuk melaksanakan setiap program yang telah dicanangkan. Terkait informasi dan kewenangan setiap orang yang terlibat dalam BUMDesa telah mengetahui informasi dan kewenangan yang dimiliki dan melakukan setiap kewenangan dengan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya untuk indikator disposisi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa pada BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi, pengangkatan staf yang ada tidak dilakukan dengan melihat dedikasi dan kemampuan dikarenakan penunjukkan pengurus BUMDesa dilakukan berdasarkan kedekatan dengan pemerintah yang ada di Desa. Untuk pemberian insentif tidak dilakukan yang diberikan adalah gaji bagi para pengurus BUMDesa yang ada sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya untuk indikator struktur birokrasi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa untuk BUMDesa yang di Kecamatan Kombi struktur organisasi yang orang – orang yang ada dalam struktur organisasi bekerja berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan pemerintah namun belum ada SOP (*Standard Operating Procedures*) yang jelas untuk menjadi pedoman agar setiap orang yang ada dalam organisasi sebagai pelaksana dapat bekerja dengan lebih efektif. Namun setiap pengurus BUMDesa yang ada selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan sehingga tidak terpecah – pecah dan menyebabkan distorsi sehingga dapat dikatakan bahwa koordinasi yang tercipta sudah cukup baik.

Pembahasan

Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa. Kecamatan Kombi merupakan salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa yang sebagian besar luas wilayah nya merupakan pesisir pantai, terdapat 13 Desa yang ada di Kecamatan Kombi. Dalam implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di setiap Desa yang ada di Kecamatan Kombi hanya 3 Desa yang sampai saat ini terus eksis dalam mengembangkan usahanya, yaitu Desa Kombi, Desa Ranowanko Dua, Desa Tulap sehingga berdasarkan hal tersebut maka penulis melakukan wawancara kepada informan yang ada di 3 Desa tersebut. Terlaksananya setiap program yang ada pada BUMDesa tentunya dipengaruhi oleh bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan yang dilakukan.

Menurut Edward III (2004) dalam Liow (2018) menyatakan bahwa dalam menilai dan menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan bisa diukur dari empat variabel berikut yaitu komunikasi yang terdiri dari 3 dimensi yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Selanjutnya sumberdaya yang terdiri dari 4 dimensi yaitu staf, fasilitas, informasi dan kewenangan. Disposisi yang terdiri dari pengangkatan birokrat, insentif. Struktur birokrasi yang terdiri dari melakukan SOP dan fragmentasi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi kebijakan BUMDesa di Kecamatan Kombi telah berjalan dengan cukup baik walaupun dari indikator komunikasi masih ditemukan ketidaksesuaian yaitu transmisi penyebaran informasi dinilai masih kurang menjangkau masyarakat yang ada dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program yang ada dalam BUMDesa dan apa saja tugas dan fungsi BUMDesa, selain itu kejelasan informasi mengenai setiap program masih sangat kurang dikarenakan masyarakat belum mengetahui secara pasti apa saja program-program yang dijalankan oleh BUMDesa yang ada dan informasi yang disampaikan terkait program tidak dilakukan secara konsisten dan terus menerus oleh BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi.

Selanjutnya untuk indikator sumberdaya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis didapati bahwa sumberdaya yang ada terkait dengan manusia (*staf*), peralatan (*facilities*), dan hal – hal lainnya yang menunjang operasional serta informasi dan kewenangan yang ada pada BUMDesa di Kecamatan Kombi, untuk sumberdaya terkait manusia sudah terbilang cukup terlatih dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi, dimana sumberdaya yang ada untuk melaksanakan kebijakan telah memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab. Namun belum banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ide-ide dan program yang kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan potensi yang ada di setiap desa untuk memajukan ekonomi di Desa. Untuk peralatan dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam rangka menunjang operasional program dan kegiatan BUMDesa sudah cukup memadai dan membantu BUMDesa yang ada untuk melaksanakan setiap program yang telah dicanangkan. Terkait informasi dan kewenangan setiap orang yang terlibat dalam BUMDesa telah mengetahui informasi dan kewenangan yang dimiliki dan melakukan setiap kewenangan dengan sebagaimana mestinya.

Selanjutnya untuk indikator disposisi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa pada BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi, pengangkatan staf yang ada tidak dilakukan dengan melihat dedikasi dan kemampuan dikarenakan penunjukkan pengurus BUMDesa dilakukan berdasarkan kedekatan dengan pemerintah yang ada di Desa. Untuk pemberian insentif tidak dilakukan yang diberikan adalah gaji bagi para pengurus BUMDesa yang ada sesuai dengan kesepakatan.

Selanjutnya untuk indikator struktur birokrasi, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ditemukan bahwa untuk BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi struktur organisasi yang adalah orang – orang yang ada dalam struktur organisasi bekerja berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan pemerintah namun belum ada SOP (*Standard Operating Procedures*) yang jelas untuk menjadi pedoman agar setiap orang yang ada dalam organisasi sebagai pelaksana dapat bekerja dengan lebih efektif. Namun setiap pengurus BUMDesa yang ada selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan sehingga tidak terpecah – pecah dan menyebabkan distorsi sehingga dapat dikatakan bahwa koordinasi yang tercipta sudah cukup baik.

Implementasi kebijakan pengelolaan BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi dinilai sudah diterapkan namun belum berjalan dengan cukup baik dikarenakan masih terdapat ketidaksesuaian berdasarkan beberapa indikator yang dinilai dimana menurut Edward III (2004) dalam Liow (2018) implementasi kebijakan yang baik adalah yang memenuhi 4 kritikal faktor penilaian yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Kemampuan suatu organisasi dalam mengimplementasikan setiap kebijakan dan program dengan baik tentunya akan menghasilkan tercapainya tujuan organisasi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dkk (2018) yang menemukan bahwa kegagalan suatu implementasi kebijakan BUMDesa disebabkan oleh tidak terlaksananya komunikasi yang didalamnya terdapat penyebaran informasi, kejelasan informasi dan konsistensi dari informasi yang diberikan sehingga membuat masyarakat sebagai sasaran dari informasi tidak mengetahui program – program yang dilaksanakan oleh BUMDesa. Selanjutnya hasil penelitian Agustina (2019) yang menemukan bahwa penerapan kebijakan BUMDesa belum sesuai karena didapati indikator komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi yang belum berjalan dengan sesuai. Namun hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Suholini dkk (2018) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan BUMDesa sudah terlaksana dengan baik dilihat dari aspek komunikasi yaitu penyebaran informasi, kejelasan informasi, konsistensi informasi, sumberdaya yaitu staf yang kompeten dalam mengelola BUMDesa yang ada, informasi BUMDesa sudah disampaikan dengan jelas, wewenang dijalankan dengan baik serta fasilitas unit usaha BUMDesa sudah tersedia dengan lengkap, disposisi dan struktur birokrasi yang telah berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Kecamatan Kombi maka dapat disimpulkan yaitu:

1. Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator komunikasi masih ditemukan ketidaksesuaian yaitu transmisi penyebaran informasi dinilai masih kurang menjangkau masyarakat yang ada dikarenakan masih ada masyarakat yang belum mengetahui program yang ada dalam BUMDesa dan apa saja tugas dan fungsi BUMDesa, selain itu kejelasan informasi mengenai setiap program masih sangat kurang dikarenakan masyarakat belum mengetahui secara pasti apa saja program-program yang dijalankan oleh BUMDesa yang ada dan informasi yang disampaikan terkait program tidak dilakukan secara konsisten dan terus menerus oleh BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi.
2. Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator sumberdaya yaitu terkait manusia sudah terbilang cukup terlatih dan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh organisasi. sumberdaya yang melaksanakan kebijakan telah memahami dan mengetahui tugas dan tanggung jawab. Namun belum banyak memberikan kontribusi dalam pengembangan ide-ide dan program yang kreatif dan inovatif dalam rangka pengembangan potensi yang ada di setiap desa untuk memajukan ekonomi di Desa. Untuk peralatan dan hal lainnya yang dibutuhkan dalam rangka menunjang operasional program dan kegiatan BUMDesa sudah cukup memadai dan membantu BUMDesa untuk melaksanakan setiap program yang telah dicanangkan. Selain itu setiap orang yang terlibat dalam BUMDesa telah mengetahui informasi dan kewenangan yang dimiliki dan melakukan setiap kewenangan dengan sebagaimana mestinya.
3. Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator disposisi, pengangkatan staf yang ada tidak dilakukan dengan melihat dedikasi dan kemampuan dikarenakan penunjukkan pengurus BUMDesa dilakukan berdasarkan kedekatan dengan pemerintah yang ada di Desa. Untuk pemberian insentif tidak dilakukan yang diberikan adalah gaji bagi para pengurus BUMDesa yang ada sesuai dengan kesepakatan.

4. Implementasi kebijakan ditinjau dari indikator struktur birokrasi yaitu orang – orang yang ada dalam struktur organisasi bekerja berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki berdasarkan peraturan pemerintah namun belum ada SOP (*Standard Operating Procedures*) yang jelas untuk menjadi pedoman agar setiap orang yang ada dalam organisasi sebagai pelaksana dapat bekerja dengan lebih efektif. Namun setiap pengurus BUMDesa yang ada selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan sehingga tidak terpecah – pecah dan menyebabkan distorsi sehingga dapat dikatakan bahwa koordinasi yang tercipta sudah cukup baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) di Kecamatan Kombi maka dapat disarankan yaitu:

1. Komunikasi yang ada terkait dengan transmisi penyebaran informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi masih perlu ditingkatkan. BUMDesa yang ada di Kecamatan Kombi sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa itu BUMDesa, tujuan BUMDesa, program apa saja yang dijalankan oleh BUMDesa agar seluruh masyarakat yang merupakan sasaran informasi dari BUMDesa dapat mengetahui dan membantu setiap program yang ada. Pengurus BUMDesa sebaiknya melakukan penyebaran informasi secara terus-menerus secara langsung maupun melalui media sosial agar mudah untuk dijangkau dan terus mendorong masyarakat untuk terlibat dalam setiap program yang dijalankan.
2. Sumberdaya terkait manusia (*staf*), peralatan (*facilities*), informasi dan kewenangan semakin ditingkatkan agar tujuan organisasi bisa tercapai. Sumberdaya manusia yang terlibat sebaiknya semakin mengembangkan ide dan program yang mampu menjangkau potensi desa yang ada untuk dikembangkan menjadi salah satu program BUMDesa agar pengembangan ekonomi desa – desa yang ada di Kecamatan Kombi semakin baik. Selain itu sebaiknya dilakukan pelatihan untuk pengembangan sumberdaya manusia yang ada, pelatihan terkait pengembangan ekonomi kreatif yang ada di Desa.

3. Disposisi terkait pengangkatan staf dan pemberian insentif, pengangkatan staf sebaiknya dilakukan dengan lebih ketat lagi dan melihat dari dedikasi dan kemampuan seseorang dan melakukan standart tes dalam pemilihan pengurus BUMDesa. Untuk pemberian insentif sebaiknya dilakukan pemberian bonus bagi anggota BUMDesa yang berprestasi.
4. Struktur birokrasi, terkait dengan SOP dan fragmentasi sebaiknya diberlakukan SOP yang jelas agar setiap orang yang terlibat dalam struktur organisasi melakukan tugas dan tanggung jawab dengan lebih teratur dan efektif untuk tercapainya tujuan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, V. (2019) Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Wanacipta Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Perspektif Masalah Mursalah. Jurnal Universitas Kalijaga Yogyakarta.
- Setiawan, D., Jostenz, T. G., Novalino, R. D. A. (2018) Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Potensi Wisata Guna Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Jurnal Universitas Pertahanan Bangka Belitung.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B. Bandung. Alfabeta.
- Toriqi, Anisaa (2015). Analisa Yuridisial Tentang Pengaturan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Berdasarkan Otonomi Desa. Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.